

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Populasi penduduk perempuan di Indonesia yang cenderung bertambah sering dipandang sebagai masalah kependudukan (Mustanir, 2017). Dinamika keberadaan perempuan saat ini tidak lepas dari konteks pemberdayaan perempuan yang menjadi rumor tersendiri dalam kajian perempuan dan pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud disini merupakan pembangunan atas keberadaan dirinya sendiri untuk memiliki kemampuan menentukan peran mereka dalam kehidupan tanpa bergantung dan mendapat perlakuan adil dari orang lain.

Masyarakat sangat berpengaruh bagi pembangunan negara, masyarakat dipercaya memiliki keampuan dalam hal tertentu terutama masyarakat perempuan. Dijelaskan juga dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Tujuan adanya pembangunan adalah untuk memperbaiki kondisi kehidupan baik dari ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat, sehingga kondisi masyarakat mengalami perubahan, dalam membangun masyarakat maka dibutuhkan peran dari pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah untuk melakukan pelayanan sosial masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi khususnya untuk kaum perempuan (Lubis, 2021).

Emansipasi perempuan juga dipengaruhi oleh tuntutan negara yang mengatasnamakan masyarakat bahwa kemajuan suatu negara ditentukan dengan bagaimana negara tersebut peduli untuk memberi akses yang cukup luas dan memadai bagi perempuan untuk beraktifitas di ranah publik. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Suatu bangsa tidak bisa maju jika perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas (Manembu, 2017).

Perempuan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sama sekali dan berada dalam posisi tidak berdaya apabila perempuan berada dalam masyarakat yang mayoritas laki-laki sebagai penguasanya. Ketidakberdayaan mengambil keputusan

dalam hidupnya, khususnya keputusan yang mempengaruhi dirinya sendiri merupakan indikasi ketidakberdayaannya. Perempuan berada pada posisi yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial karena lemahnya kekuasaan yang mereka miliki (Mulyana & Hasah, 2015). Dalam isu ketidakberdayaan perempuan ini tidak lepas dari pemberdayaan perempuan.

Masyarakat saat ini banyak berpikiran tentang apa yang harus dilakukan perempuan dan apa yang harus dilakukan laki-laki. Hal ini menimbulkan ketidakadilan perempuan yang akan berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam sebuah sistem yang diciptakan oleh masyarakat sendiri (Rahmadhani, 2019). Ketidakberdayaan perempuan saat ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, seperti halnya permasalahan gender. Permasalahan gender menjadi problem perempuan yang sangat dominan saat ini, seperti halnya mengenai peran perempuan dan laki-laki yang sering dijadikan permasalahan tersendiri.

Ketidakberdayaan perempuan yang ada di Indonesia menimbulkan berbagai problem, salah satu problem ketidakberdayaan perempuan adalah kemiskinan. Kemiskinan menggolongkan berbagai faktor ke dalam enam unsur (yaitu ketidakberdayaan, keterkucilan, kemiskinan materi, kelemahan fisik, kerentanan dan sikap/perilaku) memperlihatkan bahwa diskusi dengan kelompok perempuan cenderung lebih banyak mengungkapkan faktor yang berkaitan dengan ketidakberdayaan dan perilaku (Noerodin, 2015).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan ada beberapa lembaga yang menjadi wadah perempuan agar dapat menyetarakan kemampuan mereka yaitu antara lain kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), lembaga masyarakat, pemberdayaan lembaga masyarakat, peningkatan kualitas hidup perempuan, hak reproduksi, gerakan sayang ibu, desa dan keluarga siaga, suami siaga, peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, model desa prima, P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), perlindungan perempuan, diskriminasi terhadap Perempuan, kekerasan terhadap Perempuan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), perlindungan Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2014).

Saat ini telah berkembang gerakan atau pengorganisasian yang dilakukan oleh perempuan baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Seperti Dharma Wanita, Bhayangkari, PKK dan LSM-LSM yang membela kaum perempuan (Azizah, 2017). LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan pada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Diantara gerakan-gerakan perempuan tersebut beberapa LSM yang cukup intens membela kaum perempuan dan keberdayaan perempuan yaitu organisasi perempuan Nahdatul Ulama yang dikenal dengan muslimat dan organisasi perempuan Muhammadiyah yang dikenal dengan 'aisyah, mereka bergerak dalam bidang keagamaan. Lebih dari itu, organisasi yang bergerak intens dan telah berkembang untuk membantu memberdayakan perempuan di seluruh desa yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Letak PKK pada saat ini sangat strategis, meskipun awalnya PKK terbentuk karena untuk merealisasikan kemampuan perempuan dan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi ternyata dengan adanya PKK dapat menjadi bukti yang kuat bahwa perempuan saat ini telah mengalami kebangkitan dan kemajuan dan perempuan juga mampu terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah.

Organisasi perempuan yang berdiri sejak tahun 1967 di Jawa Tengah oleh Isriati Moenadi yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau biasa disingkat PKK. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya) karena melalui 10 program pokoknya PKK telah mampu melibatkan wanita dan pria dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri (Wati et al., 2015). Keberadaan organisasi ini di desa merupakan upaya pemerintah untuk memberikan wadah bagi perempuan agar dapat merealisasikan kemampuannya dan peran perempuan lebih bermanfaat.

Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju keluarga yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan

berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran humu dan lingkungan (Jovani, 2016). Tim penggerak yang dibentuk merupakan wadah dari pemerintah untuk masyarakat sebagai fasilitator, pelaksana, penggerak demi terlaksananya program PKK. Beberapa kegiatan yang telah diadakan pemerintah dan masyarakat dalam memberdayakan perempuan selama ini merupakan upaya untuk menciptakan pembentukan antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender agar seimbang.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah (Mulyati et al., 2021). Kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan dimana keharmonisan terbentuk, kebutuhan anggota keluarga terpenuhi dan menghadapi masalah keluarga dengan mudah diatasi bersama-sama. Dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar tercipta rasa aman, tentram, damai, kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin maka seorang suami dan istri harus menerapkan peran dan fungsi sesuai kedudukannya.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah negara khususnya dalam mengurangi masalah kemiskinan. Selain dilakukan berbagai upaya pengarusutamaan gender dan penguatan secara hukum, perlu juga dilakukan proses pendidikan, pemberdayaan, dan penyadaran agar perempuan dapat menggunakan dan memiliki akses maupun kontrol terhadap sumber daya (Nugroho, 2017). Pembangunan pemberdayaan perempuan mempunyai upaya agar terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari upaya tersebut bahwa pentingnya pemberdayaan perempuan karena memberdayakan perempuan berarti juga memberdayakan bangsa.

Pemberdayaan adalah merupakan salah satu wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk memberikan wahana bagi masyarakat dalam memenuhi akan kebutuhan warga belajar berupa pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan bagi kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Karwati, 2017). Melalui pemberdayaan ini masyarakat mampu mengembangkan kemampuan diri dan berani

dalam mengambil suatu keputusan karena pemberdayaan sendiri bertujuan agar membentuk individu yang lebih mandiri. Dalam hal ini perempuan merupakan orang yang memiliki peran penting dalam sebuah pembangunan, beberapa permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, kebodohan yang banyak terjadi pada masyarakat mendapatkan solusi dan dapat terselesaikan melalui adanya pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan perempuan dalam menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki, dan tidak pula berarti upaya untuk menyaingi atau melawan laki-laki (Ratnasari, 2016). Kesetaraan gender harus dimaknai dalam arti baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi dirinya apapun kondisinya. Pemberdayaan perempuan sangat menjunjung tinggi kebebasan mereka guna mengurangi ketergantungan mereka terhadap laki-laki.

Pemberdayaan yang dimaksud merupakan pembangunan kesadaran atas dirinya sendiri untuk memiliki kemampuan dalam menentukan kehidupan tanpa bergantung dan mendapatkan perbuatan yang tidak adil dari orang lain. Populasi penduduk perempuan Indonesia yang cenderung bertambah terus, pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah kependudukan. Namun pada sisi lain justru memandang populasi penduduk perempuan ini sebagai suatu aset pembangunan (Mustanir, 2017). Bahkan perempuan bisa menjadi aktor yang strategis dalam pembangunan, tidak hanya di desa-desa tetapi juga dalam pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat menyadari potensinya dan memahami tugas serta fungsinya sebagai perempuan. Perempuan yang mandiri boleh saja memilih menjadi ibu rumah tangga yang mencurahkan seluruh waktunya untuk mengasuh suami dan anak, bukan karena ekspektasi atau aturan turun temurun yang ditetapkan oleh nilai-nilai adat, penafsiran ajaran agama atau nilai-nilai lainnya, melainkan karena itu adalah prioritas utamanya dan keputusannya didasarkan pada prinsip-prinsip panduannya (Ratnasari et al., 2016). Dengan demikian dapat

diketahui bahwa perempuan intelektual menjadi sangat penting dan hal ini yang tentu harus ada dalam proses pemberdayaan.

Keberadaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Doho Kecamatan Dolopo dapat dikatakan sebagai organisasi yang masih aktif dan banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat desa Doho. Selama kurang lebih 39 tahun dari mulai tahun 1984 sampai saat ini, PKK di Desa Doho Kecamatan Dolopo telah memberikan dukungan dan proses dalam pembangunan bangsa dan telah mendapat pengakuan dan penghargaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa eksistensi gerakan PKK sudah diakui secara luas sebagai gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan salah satu bentuk mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Gerakan yang dijalankan oleh perempuan ini terbukti dapat mendukung terhadap terlaksananya program-program yang ada dalam organisasi ini.

Gerakan PKK yang ada di Desa Doho ini terdiri dari 4 pokja (Kelompok Kerja), pokja I meliputi pelatihan merias wajah, pokja II meliputi sosialisasi pojok baca di lima TK/RA, pokja III meliputi pelatihan memasak berbahan dasar daun kelor dan pokja IV meliputi kegiatan posyandu balita. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa Doho sudah menjalankan sesuai dengan tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat serta menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP PKK, juga merencanakan kegiatan pelatihan keterampilan membuat.

Salah satu kegiatan yang tidak semua desa menerapkan yaitu kegiatan membuat. Sekitar 3-4 tahun yang lalu PKK desa Doho pernah mengadakan pelatihan membuat, tetapi pelatihan tersebut hasilnya belum maksimal dikarenakan terhalang biaya. Biaya yang diperlukan untuk pelatihan membuat ini lumayan cukup besar. Setelah pergantian kepala desa yang dilakukan 1 tahun yang lalu, pelatihan membuat ini kembali diberi jalan agar tetap dilakukan didukung oleh kepala desa yang baru dan balai latihan kerja. Akhirnya pada tahun 2022 anggota PKK desa Doho mengajukan proposal kegiatan dan terealisasi pada tahun 2023, kegiatan tersebut juga dibantu biaya dari desa agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut. Hasil dari kegiatan membuat

tersebut dapat diperjual belikan dan PKK desa Doho dapat menghasilkan penghasilan tambahan dari kegiatan ini.

Berbicara mengenai peran PKK dalam memberdayakan perempuan, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fitria Febrianti (2022) dengan judul Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan Di Kota Malang keterkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri perempuan mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Zainal Akmal (2021) dengan judul Pemberdayaan Perempuan Berbasis Program PKK Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, keterkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai perkumpulan yang beranggotakan perempuan yaitu kaum ibu-ibu ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terkhusus perempuan serta keluarganya dan mempunyai tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa program PKK di Desa Teluk Latak yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan ekonomi yang sejahtera. Melalui pemberdayaan perempuan ini dan diberikannya 3 pelatihan-pelatihan keahlian yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Dari beberapa penelitian diatas, semua melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan perempuan melalui sebuah program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan.

Lokasi yang akan dipilih untuk memperkuat penelitian yaitu desa Doho Kecamatan Dolopo. Kecamatan Dolopo mempunyai luas wilayah 48,85 km<sup>2</sup> yang merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun. Desa Doho merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolopo, Madiun, Jawa Timur, Indonesia kode pos 63174, desa ini terbagi menjadi 4 dusun yaitu Krajan, Jerukan, Ringinanom, Cempo. Desa ini terletak antara kota Madiun dan Ponorogo yang merupakan desa

agraris dengan komoditas pertanian yang paling dominan yaitu padi, tebu dan tembakau. Dilihat dari data tahun 2024, Desa Doho terdiri dari 1.275 KK (Kepala Keluarga), laki-laki terdiri dari 2.291 orang dan perempuan terdiri dari 2.341 orang, dimana peran perempuan terlihat kurang diperhatikan dalam masyarakat terutama keluarga. Hal ini disebabkan karena kebanyakan perempuan tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, permasalahan atau isu mengenai ketidakberdayaan perempuan yang ada di Desa Doho diharapkan dapat teratasi melalui program yang ada di PKK, memberikan peran dan partisipasi terhadap perempuan sebagai fasilitator yang utama di dalam keluarga, mengasah skill yang dimiliki perempuan supaya tidak dipandang rendah baik sesama gender maupun gender yang lain. Peran perempuan dapat diasah melalui beberapa program yang telah disediakan oleh PKK seperti kegiatan rias wajah, sosialisai pojok baca, pelatihan memasak dan posyandu. Oleh karena itu diadakan pemberdayaan perempuan supaya perempuan memiliki jati diri di dalam keluarga maupun di tempat-tempat lainnya seperti dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Diharapkan perempuan tidak dipandang rendah di muka umum karena sejatinya pemberdayaan perempuan ini berguna untuk mempertinggi rasa percaya diri dan dapat mengontrol perempuan dalam berbagai aspek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Peran dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terhadap pemberdayaan perempuan dalam keluarga di Desa Doho Kecamatan Dolopo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terhadap pemberdayaan perempuan dalam keluarga di Desa Doho Kecamatan Dolopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui peran dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terhadap pemberdayaan perempuan dalam keluarga di Desa Doho.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terhadap pemberdayaan perempuan dalam keluarga di Desa Doho.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap yang bersangkutan dalam penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah sumber informasi.
- b. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan sumber acuan untuk diimplementasikan di masyarakat luas.
- c. Bagi mahasiswa, menambah wawasan dan pengalaman peneliti, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan sebagai sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat dalam pemberdayaan serta pengembangan masyarakat terutama Perempuan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana sesungguhnya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terhadap pemberdayaan perempuan dalam keluarga di Desa Doho Kecamatan Dolopo dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi pemerintah desa agar meningkatkan program pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.